

VOC DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI INDONESIA

Tarmizy Idris

Dosen Sejarah dan Peradaban Islam Kawasan Asia Tenggara Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,
e-mail: tarmizy_idris@uinjkt.ac.id

Abstract

Before the European invaded Indonesia, the capitalistic trade system in Indonesia had grown up. But such kind of system strongly related to political issues which caused the birth of bureaucratic capitalism. The situation didn't enable the free capitalistic trade system to grow up rapidly. The arrival of VOC had made serious change in Indonesia capitalistic system that time. The predominance of VOC's bureaucracy and military had blessed it the power to uphold monopoly system in Indonesian trade and destroy its capitalistic system. Basically, the downfall of Indonesian capitalistic system was caused by its weak cultural system which didn't have a strong foundation for capitalism. The Indonesian cultural values didn't protect the property right of people. Moreover, the absolute power of Kings didn't give conducive opportunities to the people to accumulate their capital and develop their business.

Keywords: trade, VOC, Capitalism

Abstrak

Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Di Indonesia telah berkembang perdagangan dengan kapitalisme yang kuat. Tetapi perdagangan itu selalu terkait erat dengan permasalahan politik, sehingga memunculkan kapitalisme birokrat. Situasi ini tidak memungkinkan berkembangnya kapitalisme yang memiliki etos perdagangan yang bebas. Kedatangan VOC telah membawa dampak sangat serius terhadap kapitalisme Indonesia. Keunggulan VOC dalam bidang birokrasi, dan militer memberikan kekuatan kepadanya untuk menegakkan sistem monopoli dalam perdagangan di Indonesia, yang menghancurkan kapitalisme Indonesia. Kehancuran kapitalisme Indonesia pada dasarnya lebih disebabkan sebagai akibat kerapuhan sistem budaya Indonesia yang tidak memberikan pijakan kuat terhadap perkembangan kapitalisme. Nilai-nilai budaya Indonesia tidak memiliki perlindungan yang kuat terhadap hak milik pribadi rakyat. Di samping itu, kekuasaan absolut para raja dengan tindakannya yang sewenang-wenang tidak memberikan peluang kondusif untuk perkembangan perdagangan dan akumulasi modal pada rakyat.

Kata Kunci: Perdagangan, VOC, Kapitalisme

Pendahuluan

Sebelum kedatangan orang-orang Eropa yang pertama di Asia Tenggara pada awal abad ke-16, di kawasan ini telah berkembang emporium-emporium yang mempunyai aktivitas perdagangan yang sangat tinggi. Sejak kekuasaan

Sriwijaya mengalami kemerosotan pada akhir abad ke-13. Pidie dan Samudra-Pasai muncul menggantikannya sebagai emporium perdagangan di Sumatra. Pada abad berikutnya ditandai dengan munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di sepanjang pantai timur Sumatra dan di

seberang Selat Malaka, kesemuanya bertahan dan dan masih memainkan peranannya pada awal abad ke-16, seperti kerajaan Aceh, Lamuri, Arkat, Rupert, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, serta Klang, Bernas dan Perak di pantai Semenanjung Malaya.

Semenanjung itu, pada awal abad ke-15 Malaka telah berkembang sebagai pusat perdagangan yang paling ramai dan berpengaruh, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi merupakan salah satu pusat perdagangan di Asia.¹ Para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, Bengala, Pegu, Siam, Cina pada satu pihak, dan pedagang dari Sumatra, Jawa, Maluku dan kepulauan kecil lainnya pada pihak lain bertemu untuk meraih untung di Emporium itu.

Penaklukan Malaka oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque pada Agustus 1511, mengakibatkan banyak pedagang Malaka yang merasa kurang aman pindah ke Aceh pada waktu itu sedang tumbuh sebagai Negara besar di bagian barat kepulauan Nusantara. Aceh tumbuh semakin kuat dan muncul sebagai salah satu pusat kekuasaan politik dan ekonomi yang sangat berpengaruh di Indonesia.²

Sementara itu, di Jawa bersamaan dengan kejatuhan Majapahit antara tahun 1478-1479 muncul kota-kota Bandar entrepot seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Cirebon, Sunda Kelapa dan yang paling penting adalah Banten sebagai emporium yang paling besar di Jawa. Mataram sebagai kerajaan yang bersifat agraris menguasai perdagangan beras dan kayu. Emporium-emporium Indonesia bagian timur, yaitu Ternate, Tidore, Goa, Makasar dan Banjarmasin. Kota-kota

Bandar emporium bagian barat juga menjadi partner perdagangannya.

Pada emporium-emporium besar seperti Malaka, Aceh, Banten dan Makassar tersedia sarana dagang yang cukup baik, seperti barang perdagangan yang diperlukan, pergudangan, penginapan dan sarana keuangan, sehingga berkembang perdagangan dalam kapasitas besar. Para pelaku ekonominya selain dari pada *peddlers* (penjaja), terdapat juga *merchants* (saudagar) yang kapitalis.

Tetapi kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dengan badan usahanya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) telah membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Keunggulan VOC dalam aspek administrasi-birokrasi dan militer dalam menerapkan sistem monopoli dalam perdagangan, telah membawa akibat hancurnya struktur perdagangan Indonesia.

Makalah ini merupakan suatu studi awal untuk mengkaji; mengapa kapitalisme Indonesia demikian rapuh dan tidak mampu bertahan menghadapi persaingan dari luar; dan mengapa pula VOC dapat mempertahankan hegemoninya dalam persaingan perdagangan di Indonesia. Akhirnya, makalah ini ingin mengetahui bagaimanakah dampak yang ditimbulkan VOC terhadap ekonomi Indonesia. Dengan tidak mengabaikan perkembangan entrepot, makalah ini akan memusatkan perhatian pada emporium-emporium besar seperti Malaka, Aceh, Banten dan Makasar.

Struktur Perdagangan Indonesia

Pertumbuhan emporium-emporium besar di Indonesia, seperti Malaka, Aceh, Banten dan Makasar dalam kurun niaga sangat erat kaitannya dengan sistem angin yang berlaku di Asia Selatan, Tenggara, dan Timur. Arah angin sangat menentukan jalur navigasi yang ditempuh tergantung pada siklus musim panas dan dingin di daratan Asia, khususnya bagi Indonesia pada siklus

¹Armando Cortesao, (ed. and trans.), *The Suma Oriental of the Tome Peres and the Book of Francisco Rodrigues*, 2 Jilid, London: The Hakluyt Society, 1944, hal. 135-136.

²M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hal. 66-67.

Australia.³ Di samping itu, sistem dan perkembangan politik memainkan peranannya yang sangat besar pula. Maka berkembangnya Malaka, Aceh, Banten, dan Makasar sebagai emporium-emporium besar ketika itu sangat terkait dengan kedua faktor di atas.⁴

Meskipun masih diperdebatkan asal-usulnya, para sejarawan menetapkan Paramiswara sebagai pendiri Malaka. Dengan dibantu oleh *orang laut* (perompak) dan sejumlah orang Melayu yang menyeberang dari Palembang, dia dengan cepat membangun tempat pemukiman besar, pasar tidak tetap, dan pusat perompak.⁵ Di tempat baru ini, dia menemukan satu pelabuhan yang baik yang dapat dirapati kapal-kapal di segala musim dan terletak di bagian Selat Malaka yang paling sempit. Dengan sekutu-sekutunya itu, dia memaksa kapal-kapal yang lewat untuk singgah di pelabuhannya serta memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup baik dan dapat dipercaya bagi pergudangan dan perdagangan.⁶

Malaka berkembang sebagai pasar tidak hanya untuk rempah-rempah tetapi juga hasil kerajinan berbagai bangsa. Dalam sistem perdagangan abad ke-15, letak Malaka sangat strategis karena merupakan titik pertemuan antara sistem pelayaran dan perdagangan di Samudra Indonesia dengan sistem di Nusantara. Sebagai pusat atau titik simpul dari segala penjuror dalam sistem pelayaran, maka Gujarat dan Bengala mempunyai hubungan langsung dengan Malaka, di mana pedagang-pedagang baik dari Cina, Asia Tenggara, maupun seluruh Nusantara berkumpul di sana.

Rempah-rempah Indonesia yang dihasilkan Maluku (kepulauan rempah-

rempah) dan pulau lainnya merupakan komoditi yang sangat penting dalam sistem perdagangan ketika itu. Dari Jawa, Malaka menerima kiriman rempah-rempah, batu-batu setengah permata, emas, budak, dan kuda. Malaka sangat tergantung atas suplai beras dari Jawa serta bantuan pasukan terhadap serangan militer dari Johor dan kerajaan Aceh di Sumatra.⁷

Hubungan perdagangan yang sama juga terjadi dengan Sumatra, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan kepulauan lainnya di Nusantara. Arus keluar-masuk barang tercatat sangat tinggi, setiap tahunnya di Malaka sekitar seratus kapal besar, tiga puluh sampai empat puluh kapal sedang, dan perahu serta jung kecil tidak terhitung jumlahnya melakukan bongkar-muat.⁸

Dalam abad ke-16, lada memainkan peranan utama dalam perdagangan dan menjadi faktor penting dalam pergeseran pusat perdagangan dan politik. Melalui penguasaan perdagangan lada, Aceh dan Banten mengukuhkan dirinya sebagai pusat kekuasaan perdagangan dan politik di Indonesia bagian barat.

Sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada Agustus 1511, Aceh berusaha menarik perdagangan internasional dan kepulauan Nusantara. Sultan pertamanya, Ali Mughayat Syah (1514-1530) berusaha menguasai pelabuhan-pelabuhan pengespor lada dan mengontrol pelabuhan-pelabuhan pengespor lada dan mengontrol pelabuhan-pelabuhan transit di bawah kekuasaannya. Kebijakan ini diikuti oleh pengganti-penggantinya yang menyusul kemudian.

Setelah menguasai pantai Timur Sumatra, seperti Pedir, Pasai, Dalu, Aru, Aceh berusaha menganeksasi Jambi,

³Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, jilid 1, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 5-6.

⁴Untuk hal ini lihat lebih jauh Ricklefs, *op.cit.*, terutama bab 4.

⁵D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hal. 190.

⁶Ricklefs, *op.cit.*, hal. 27-28.

⁷K.N. Chaudhuri, *Trade and Civilization in the Indian Ocean an Economic History from the Rise of Islam to 1750*, Cambridge University Press, 1950, hal. 74-76.

⁸Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 8-9.

Johor, Indragiri, dan Palembang. Meskipun mendapat tantangan yang keras, Aceh dapat menanamkan hegemoninya di kawasan itu. Pengaruhnya segera melampaui kerajaan-kerajaan Semenanjung Malaya, seperti Kedah, Perak, Pahang, dan Johor. Ekspansi Aceh sejak itu berhasil menguasai pantai Barat Sumatra dan mencakup Tiku, Pariaman dan Bengkulu.⁹ Kedudukan Aceh sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat membuka peluang bagi negara itu untuk menjalin perdagangan dengan Cina, Siam, Gujarat, Arab, dan membuka hubungan dagang dengan Turki, yang kurun waktu itu merupakan emporium Islam yang terbesar.¹⁰

Di samping melakukan perdagangan rempah-rempah, beras, emas, kapur barus dan barang lainnya, Aceh mengontrol perdagangan lada di pantai Barat Sumatra. Penguasa-penguasa Aceh setelah tahun 1627 memiliki beberapa kapal besar yang mengangkut lada sampai ke Laut Merah.¹¹

Banten muncul sebagai suatu titik simpul penting antara lain karena perdagangan ladanya serta tempat menampung pelarian dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping dapat menarik perdagangan lada dan menampung pedagang-pedagang dari Malaka, untuk memperkuat posisinya terhadap serangan Mataram. Banten menjalin hubungan dagang dan politik dengan Makasar,¹² dan bahkan dengan VOC yang menjadi musuh besarnya kemudian.¹³

Penguasa Banten kedua, Hasanuddin (1552-1570), memperluas kekuasaan Banten ke daerah penghasil lada, Lampung di Sumatra Selatan, yang

sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Dengan demikian, dia telah meletakkan dasar-dasar bagi kemakmuran Banten sebagai sebuah pelabuhan lada. Putranya, Maulana Yusuf (1570-1580), telah berhasil menaklukkan Pajajaran sekitar tahun 1579. Dengan jatuhnya Pajajaran, maka lenyaplah kerajaan besar terakhir yang menganut agama Hindu-Budha di Jawa. Setelah Pajajaran berhasil ditaklukkan, maka konon kalangan elite Sunda memeluk Islam.¹⁴

Persekutuannya dengan Makasar membentuk jalur perdagangan Makasar-Banten-Malaka, telah memberikan keuntungan yang besar kepada negara itu. Para pedagang dari Malaka lebih banyak datang ke Banten untuk mengambil rempah-rempah yang dihasilkan dari Pulau Jawa dan yang didatangkan dari Maluku. Sebagaimana pusat-pusat perdagangan lainnya, di Banten terdapat koloni bangsa Gujarat, Pegu, Siam, Persia, Arab dan Turki. Di samping itu, terdapat juga perkampungan pedagang Melayu, Ternate, Banda, Bugis, Banjar, dan Makasar.¹⁵ Demikian juga, pedagang-pedagang Cina tidak sedikit jumlahnya di Banten. Kegiatan mereka meluas di bidang perbankan, antara lain dengan memberi pinjaman modal untuk jual-beli komoditi; memberi komoditi sebagai *comenda* kepada pedagang penaja atau pengecer; pemborongan pajak, dan sebagainya.¹⁶ Seperti halnya dengan di Aceh, Jambi dan Palembang, golongan *orang kaya* (*patricers*) sangat besar pengaruhnya di Banten, banyak jabatan kerajaan dipegangnya, khususnya mengurus perdagangan dan bea cukai.¹⁷

Pada pertengahan abad ke-17, Makasar memainkan peranan penting dalam percaturan politik dan perda-

⁹ Ricklefs, *op.cit.*, hal. 66-67.

¹⁰ K.N. Chaudhuri, *op.cit.*, hal. 75.

¹¹ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, vol. 2, Yale University Press, New Haven and London, 1988, hal. 66.

¹² Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 68.

¹³ Ricklefs, *op.cit.*, hal. 120-123.

¹⁴ Ricklefs, *ibid.*, hal. 57.

¹⁵ J.C. van Luer, *Indonesian Trade and Society*, The Hague van Hoeve, Bandung, 1955, hal. 132.

¹⁶ *Ibid.* hal. 138.

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 113.

gangan di Indonesia bagian timur. Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis dan kemunduran pelabuhan-pelabuhan transit di Pulau Jawa, mengakibatkan banyak pedagang Melayu-Malaka dan Jawa yang datang ke Makasar, dan kota ini segera menjadi pusat perdagangan Indonesia bagian timur.¹⁸ Rempah-rempah Maluku, dan bahan makanan lainnya terutama beras, bahan wangi-wangian, penyus, dan sebagainya diekspor melalui Makasar. Di Makasar ada juga perdagangan budak belian.¹⁹

Dengan perkembangan pelabuhan yang begitu pesat, maka datanglah barang-barang ke Makasar, seperti sutera, dan pecah belah Cina dengan kapal Siam dan bahan pakaian dengan kapal Portugis. Terciptanya perdamaian dan keamanan di Sulawesi Selatan di bawah hegemoni Goa dan Tallo memungkinkan perkembangan perdagangan internasional yang tertarik ke sana membawa banyak kekayaan. Kedudukannya sebagai pelabuhan transit atau entrepot sangat tergantung pada aliran rempah-rempah dari Maluku, Seram dan Ambon, dan pada produksi beras serta bahan makanan lainnya yang dibutuhkan untuk bekal pelayaran. Karena perdagangan rempah-rempah sangat vital bagi Makasar, maka setiap usaha menguasai daerah penghasil bahan-bahan itu akan mengancam kepentingannya, sehingga tidak dapat dielakkan adanya konflik dengan Ternate pada satu pihak dan VOC pada pihak lain.²⁰

Perkembangan pesat emporium-emporium itu dan kebijaksanaan Portugis dalam mengembangkan agama Kristen membawa pengaruh terhadap meluasnya penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam pada emporium-emporium itu semakin memberikan keamanan

kepada para pelaku ekonomi di bandar-bandar pusat perdagangan itu, dan hal itu akan mendorong perkembangan yang lebih positif dalam perkembangan ekonomi. Tetapi meskipun demikian, hampir dalam setiap ekspansi yang dilakukan oleh penguasaan-penguasaan Islam di Indonesia, kekuasaan dan keuntungan ekonomi merupakan motif paling utama.

Pada emporium-emporium itu terdapat sarana ekonomi yang sangat baik, seperti penginapan, pergudangan dan sarana keuangan lainnya, seperti kredit dan peminjaman modal. Transaksi perdagangan tidak lagi dilakukan dalam sistem barter, tetapi dengan cara *cash* (*keueuh*), Aceh, yaitu dengan menggunakan mata uang *deureuham* (Aceh), *dinara* (Makasar), *mas* (Melaku-Malaka) dan *picis* (Jawa),²¹ dan mata uang asing juga beredar di emporium-emporium itu.²² Meskipun terdapat sarana kredit dan peminjaman modal, tetapi perbankan seperti di Eropa belum dikenal di Indonesia ketika itu.

Para pelaku ekonomi di emporium-emporium itu terdiri dari pedagang-pedagang asing dan pribumi yang memiliki kekayaan yang besar seperti Gujarat, Persia, Arab, Bengala pada satu pihak, Jawa, Aceh, Makasar dan Melayu pada pihak lain. Di Malaka menurut Tome Peres sebanyak tiga ribu orang.²³ Mereka itu tidak saja para *peddlers* (penjaja) seperti yang dikatakan J.C. van Luer,²⁴ tetapi terdapat juga para *merchants* yang kapitalis.²⁵ Para *merchants* umumnya terdiri dari aristokrasi, atau pejabat tinggi dalam suatu kerajaan. Seorang nakhoda yang bernama Marsaly, yang juga seorang pejabat di kerajaan Aceh (berasal dari kerajaan Johor) sebagai contoh seorang *merchants* yang

¹⁸ *Ibid*, hal. 68-69.

¹⁹ M.A.P. Meilink-Roelofs, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1680*, The Hague Martinus Nijhoff, 1962, hal. 163-164.

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 89.

²¹ Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 96-100.

²² Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 16.

²³ Armando Cortesoa (ed. and trans), *op.cit.*, hal. 255.

²⁴ J.C. van Luer, *op.cit.*, hal. 60.

²⁵ Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 115.

sukses kedudukannya. Dia mempunyai rumah yang sangat besar dan taman bunganya yang indah di Banda Aceh.²⁶

Penguasa Aceh, Iskandar Muda (1607-1636) dan pengganti-penggantinya, penguasa-penguasa Banten dan Makasar adalah raja-raja kapitalis. Mereka memungut pajak pada pedagang yang berdagang di wilayah kekuasaannya, menerima upeti-upeti, memiliki kapal-kapal dagang, dan memberikan kredit kepada pedagang yang membutuhkan pinjaman modal.²⁷ Iskandar Muda umpamanya, menerima satu sampai dua persen dan penguasa-penguasa Banten meminta satu sampai lima persen dari keuntungan yang diperoleh pedagang yang meminjam modal padanya.²⁸

Perdagangan di Malaka, Aceh, Banten dan Makasar sebagai emporium-emporium besar dan juga di kota-kota bandar lain sebagai *entrepot*, rupanya tetap merupakan masalah politik, yakni tetap berada di tangan non-pribumi, walaupun itu ada terbatas pada elite pemerintahan paling atas. Namun ini tidak menghindari bahwa undang-undang dan administrasi memajukan perdagangan dengan luar. Para pedagang yang mengimpor barang-barang ke emporium-emporium itu memberikan *hadiah* atau *upeti* kepada raja, yang biasanya sebesar satu sampai dua persen dari harga barang yang mau dijual di emporium itu. Perlu ditegaskan bahwa *upeti* itu di luar pembayaran pajak atau bea cukai.

Pada pertengahan abad ke 17, banyak aristokrasi Banten dan Makasar bergerak dalam perdagangan dengan cara menginvestasikan modalnya, memberikan pinjaman modal, membangun kapal-kapal dan terkadang ikut dalam pelayaran.²⁹ Tetapi tidak demikian dengan Raja Mataram, Sultan Agung, dia adalah seorang raja yang tidak memiliki visi

perdagangan, seperti ditegaskannya sendiri: "*I am a prince and a soldier, not a merchants like other prince of Java*".³⁰

Sebagaimana halnya dengan wilayah lain di Asia Tenggara, di Indonesia tidak terdapat perlindungan yang tegas terhadap hak milik pribadi, yang menghambat perkembangan lembaga-lembaga keuangan dan mencegah akumulasi modal tetap. Pada satu pihak perkembangan pasar yang pesat, dan pada pihak lain kekuasaan raja yang mengekang, justru menimbulkan ketegangan-ketegangan dan bukan kerjasama antara keduanya.³¹

Kekuasaan absolut para raja di Indonesia, mendorongnya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Hak milik rakyat tidak memiliki perlindungan yang kuat, dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat disita oleh raja. Akibatnya, rakyat tidak berniat untuk menginvestasikan hartanya menjadi barang terpasang, seperti bangunan, kapal, barang-barang dagangan atau mesin. Mereka lebih cenderung memiliki permata atau pakaian yang indah-indah, karena sewaktu-waktu mudah disembunyikan.³²

Dalam sistem budaya Indonesia, hubungan antara kekuasaan dan perdagangan sangat bertautan dan cenderung kabur. Para penguasa Indonesia dan para menterinya sepenuhnya bergiat dalam perdagangan. Para pedagang yang berhasil cenderung menjadi pemegang kekuasaan, baik dengan cara bersekutu dengan kekuasaan yang sudah ada maupun dengan membentuk kekuasaan baru.³³ Dengan demikian, kita akan mengalami kesulitan untuk menemukan suatu kelas pedagang yang mempunyai etosnya tersendiri yang berbeda dengan istana, adalah merupakan hambatan yang sangat serius terhadap perkembangan kapitalisme.

²⁶ *Ibid.*, hal. 118.

²⁷ *Ibid.*, hal. 109-111.

²⁸ *Ibid.*, hal. 119.

²⁹ *Ibid.*, hal. 123.

³⁰ *Ibid.*, hal. 284.

³¹ *Ibid.*, hal. 268.

³² *Ibid.*, hal. 270.

³³ *Ibid.*

Pengaruh VOC Terhadap Ekonomi Indonesia

Pada bulan Maret 1602, perseorangan-perseorangan dagang di Negeri Belanda bergabung membentuk Perserikatan Maskapai Hindia Timur, VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*). Pada satu pihak, keputusan itu diambil untuk mengakhiri persaingan dagang yang tidak sehat antara perseroan dalam negeri, dan pada pihak lain ialah untuk memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dagang melawan Spanyol, Inggris dan Portugis.³⁴

Gabungan perseroan itu kemudian disahkan dalam suatu piagam oleh Staten General (Parlemen Belanda), dan memberikan wewenang eksklusif kepada VOC untuk berdagang, mengadakan peperangan, dan perdamaian, memiliki angkatan perang di laut maupun di darat dan mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Pimpinan VOC terdiri dari tujuh belas orang anggota yang disebut *Heeren Zeventien* (Tuan-tuan Tujuh Belas). Amsterdam karena mempunyai peranan yang sangat besar diberi jatah delapan orang dari tujuh belas direktur dan markas VOC ditempatkan di situ.³⁵

Sebagai organisasi dagang yang paling maju, VOC memiliki modal yang sangat besar (6.5 juta guilders), sementara East India Company dari Inggris yang dibentuk pada tahun 1600 hanya memiliki modal sebanyak 1/10 dari jumlah itu, perusahaan orang-orang Denmark yang dibentuk pada tahun 1616 hanya memiliki modal 1/14 yang dimiliki VOC. Pada tiga tahun pertama, VOC sanggup mengirimkan lebih dari dua belas buah kapal setiap tahunnya, dan jarang kurang dari enam buah kapal dan 14.000 orang sepanjang abad ke-17, suatu perbedaan yang sangat mencolok dengan Portugis dan para pesaing lainnya. Pada dekade kedua abad ke-17, VOC sanggup mengumpulkan sekitar 117, dalam dekade ketiga 148, dan dalam

tahun 1660-an sejumlah 257 buah kapal, sebagian jumlah yang paling besar.³⁶ Hal ini berarti akan membawa dampak yang sangat luas dalam perdagangan di Asia Tenggara umumnya dan Indonesia khususnya.

Pada tahun-tahun pertama, Tuan-tuan Tujuh Belas menangani sendiri segala urusan VOC dari Amsterdam, tetapi segera disadari bahwa mereka tidak mungkin dapat mengelola pelaksanaan harian di Asia. Jarak kawasan ini sangat jauh, sehingga pertukaran berita antara Amsterdam dan Indonesia dapat memakan waktu dua atau tiga tahun. Untuk menangani secara lebih cepat segala urusan VOC di Asia, maka pada tahun 1610 diciptakan Gubernur Jenderal. Untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan Gubernur Jenderal yang bersifat dispotis, maka dibentuklah Dewan Hindia (*Raad van Indie*) yang bertugas menasehati dan mengawasinya.³⁷

Tujuan utama VOC adalah untuk melakukan monopoli atas rempah-rempah atau hasil-hasil perkebunan pada masa itu serta beras dari Mataram, dan juga untuk memperoleh kedudukan mutlak dalam *inter Asean trade and shipping*, yakni kedudukan mutlak dalam hubungan datang antar Asia. Tetapi kelak, karena daya yang terbatas menjadi kedudukan mutlak dalam perdagangan dan pengangkutan Nusantara ditambah dengan jalur-jalur Sri Lanka, Jepang, Taiwan, dan lain-lain.³⁸

Sejak memulai kegiatan di Indonesia, VOC menghadapi suatu dunia perdagangan internasional dengan sistem terbuka. Emporium-emporium besar seperti Malaka, Aceh, Banten, dan kemudian Makasar, merupakan tempat segala bangsa dapat bertemu untuk menjajali barang dagangannya. Peraturan jual-beli, proses penawaran dan penen-

³⁴Ricklefs, *op.cit.*, hal. 37-39.

³⁵*Ibid.*, hal. 40-41.

³⁶ Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 273.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Onghokham, "Bentuk Negara di Indonesia dan Aspek Internasionalisasi" dalam Prisma No. 8, LP3ES, Jakarta, 1984, hal. 26.

tuan harga, kesemuanya mengikuti pola atau sistem pasar bebas. Prinsip itu dapat kita temukan umpamanya dalam penegasan Sultan Hasanuddin, Raja Makasar, sebagai pokok persyaratan yang diajukan kepada VOC untuk mengadakan perjanjian pada tahun 1659. Raja ini menegaskan "Tuhan menciptakan bumi agar umat manusia dapat menikmatinya"; dan ditambah pertanyaan "apakah tuan berpendapat bahwa Tuhan telah menyediakannya khusus bangsa tuan yang tinggal sangat jauh dari pulau-pulau itu?" Bangsa Portugis, Inggris dan Spanyol meskipun semula hendak menguasai perdagangan untuk keuntungannya sendiri terpaksa melepas maksud itu dan tunduk kepada sistem yang berlaku. Tetapi VOC ternyata bersikeras untuk menjalankan politik monopolinya yang sangat bertentangan dengan sistem yang berlaku di Indonesia dan bahkan dengan hukum perdagangan internasional.³⁹

Dengan memiliki keunggulan administrasi dan birokrasi serta kekuatan militer, VOC memaksakan diri untuk menjalankan politik monopoli dalam perdagangan, yang merupakan diri khas kapitalisme.⁴⁰ Maka dengan demikian, tatkala memulai kegiatan di Indonesia, VOC segera harus berkonfrontasi dengan Portugis, Inggris dan juga dengan pedagang-pedagang pribumi. Meskipun pada tahun-tahun pertama pembentukannya dapat memberikan keuntungan yang besar, tetapi secara militer belum begitu berarti. Satu-satunya keberhasilan besar VOC adalah pendudukan atas Ambon pada tahun 1605.⁴¹

Dengan bersekutu dengan orang-orang Muslim di situ Belanda berhasil mengusir Portugis di Ambon dan

merebut benteng Portugis, kemudian memberi nama baru *Victoria*, yang kemudian menjadi basis Gubernur Jenderal pertama, Pieter Both, yang diangkat pada tahun 1610 untuk mengurus benteng-benteng, tempat-tempat, kantor-kantor, orang-orang, dan usaha dari VOC dari Asia.⁴² Pada tahun itu Ambon merupakan wilayah pertama di Indonesia yang menjadi koloni Belanda dan VOC mulai memperoleh monopoli rempah-rempah dan barang dagangan lainnya seperti bahan pakaian yang sebelumnya dipegang Portugis, Gujarat, dan Bengali. Tetapi karena VOC tidak menguasai politik keuangan, maka akhirnya tidak mampu menghambat perdagangan bahan-bahan pakaian oleh Portugis dan bangsa lainnya. Untuk itu, VOC melarang pengangkutan dengan kapal-kapal pribumi barang-barang Portugis, semua ekspor rempah-rempah perlu dihentikan, dan bahkan lebih drastis lagi yaitu pohon-pohon pala dan cengkeh ditebangi.⁴³

Pada tahun 1619, Jan Pieterszoon Coen diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC yang kedua. Pengangkatan Coen menandai kebijaksanaan VOC semakin ketat dalam bentuk penggunaan kekerasan di berbagai tempat untuk membangun benteng-benteng dan kemudian memonopoli perdagangan. Dalam tahun 1618 VOC telah membakar sebagian besar dari Jepara dan perahu-perahu yang ada di pelabuhannya. Pada waktu yang sama, VOC memperkuat lojinya di Jakarta yang menjadi wilayah Banten, sekalipun dilarang oleh Bupati. Dalam bulan Mei 1619, setelah pertarungan empat pihak antara Sultan Banten, Bupati Jakarta, orang-orang Inggris, dan Belanda, Coen mendarat di kota itu dengan tujuh belas buah kapal dan membakar rumah-rumah dan mengusir penduduknya. Kemudian di tempat itu ia membangun sebuah

³⁹Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 72-92.

⁴⁰Ferdinand Broudel, *Civilization and Capitalism 15th-18th Century*, vol. 2, *The Wheels of Commerce*, Collins/Fontana Press, London, 1982, hal. 443-444.

⁴¹Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara a History of Indonesia*, The Hague, Leiden, 1985, hal. 119.

⁴²Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 273.

⁴³M.A.P. Mailing-Roelofs, *op.cit.*, hal. 207.

benteng yang tidak terkalahkan, dimana perdagangan di Asia bisa dikendalikan.⁴⁴

Dalam pada itu, untuk memperkuat kebijaksanaan monopolinya Coen tidak memperhatikan suatu perjanjian yang telah dibuat di Eropa pada tanggal 17 Juli 1619, yang mengharuskan VOC dan East India Company bekerjasama di Asia. Dengan kecongkakannya, Coen menyerobot kebijaksanaan para dioreksi VOC di Belanda dan tetap menegakkan kebijaksanaan lama, yang pada tahun 1608 ditegaskan *Heeren Zeventions* "Banda dan Maluku adalah sasaran utama kita menembak".⁴⁵

Pada bulan Januari 1621, Coen memang membuktikan ambisinya, dengan memimpin armada sejumlah dua belas kapal, ia menaklukan lima puluh pulau kecil yang membentuk kepulauan Banda. Sebagai seorang yang bermental penakluk, Coen tidak sudi menghabiskan waktunya untuk berunding dengan pemuka masyarakat pluralis di pulau itu. Hampir semua pendidikan, yang diperkirakan sekitar 15.000 orang jumlahnya, dibunuh, dijadikan budak di Batavia, atau dibiarkan mati kelaparan di tempat terpencil. Coen kemudian menempatkan orang-orang Belanda sebagai petani di kepulauan pala itu bersama budak mereka sebagai tenaga kerja, yang harus menyerahkan semua produk mereka kepada VOC.⁴⁶

Seperti telah dijelaskan di atas, hubungan Makasar dengan VOC mau tak mau akan berkembang menjadi rivalitas, karena tujuan utama VOC untuk memegang monopoli perdagangan langsung bertabrakan dengan prinsip sistem terbuka, suatu hal yang menjadi kepentingan Makasar selama berkedudukan sebagai pusat perdagangan dengan hegemoni politik sebagai dukungannya. Maka sejak tahun 1660, konflik antara keduanya tidak dapat dihindarkan, malahan semakin memuncak. Perang

Makasar yang mulai terjadi 1660 memperlihatkan sikap heroik rakyatnya dalam mempertahankan harta dan kehormatannya dari jarahan kaum penjajah. Tetapi bagaimana pun juga, kemenangan VOC selalu didukung oleh faktor internal Indonesia sendiri. Arung Palaka, seorang Pangeran Bugis, yang tidak puas telah menjadi faktor penentu bagi kemenangan VOC dalam menaklukan Makasar. Tahun 1669, Makasar sepenuhnya dikuasai VOC dan wilayah itu merupakan emporium terbesar terakhir yang dikuasai orang Asia di sebelah timur dari Jawa.⁴⁷

Tahun 1670-an, VOC telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya di Indonesia bagian timur, sekarang perhatiannya lebih dipusatkan pada Indonesia bagian barat. Pada bulan Maret 1682, sebuah pasukan VOC yang dipimpin oleh Francois Taok dan Isac de Saint-Martin berlayar menuju Banten. Setelah melakukan serangan beberapa lama, pada bulan Maret 1683 Sultan Ageng dipaksa menyerah dan bersamaan dengan itu kemerdekaan Banten menjadi terbatas dan monopoli lada jatuh ke tangan VOC.⁴⁸

Sekitar tahun 1682, musuh-musuh utama VOC di Jawa telah berhasil dihancurkan. Mataram sepeninggal Sultan Agung (1613-1646) tidak lagi dipandang sebagai lawan yang berarti oleh VOC. Pengganti Sultan Agung, Amangkurat I, tidak lagi meneruskan politik ekspansi dan konfrontatif sebagaimana dilakukan Sultan Agung. Pemberontakan yang dilancarkan Trunajaya terhadap Pleret pada 1676 mengakibatkan Amangkurat II meminta bantuan VOC. Suatu perjanjian yang ditandatangani pada bulan Februari 1677 yang kemudian diperkuat lagi pada bulan Juli 1677 telah memberikan hak monopoli dan kekuasaan yang sangat besar kepada VOC.⁴⁹ Meskipun dalam

⁴⁴ Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 274.

⁴⁵ D.G.E. Hall, *op.cit.*, hal. 266-267.

⁴⁶ Anthony Reid, *loc.cit.*, hal. 274.

⁴⁷ Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 279-290.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 281.

⁴⁹ Ricklefs, *op.cit.*, hal. 113-115.

waktu-waktu tertentu masih terjadi pembangkangan terhadap VOC, tetapi mulai masa Amangkurat II VOC telah memperoleh segalanya di Mataram.

Negara Nusantara yang paling mempertahankan baik kebebasan bertindak maupun statusnya sebagai pelabuhan internasional, adalah Aceh. Pemerintahan terpusat untuk sementara waktu berhasil bertahan setelah penciptanya, Iskandar Muda, meninggal pada tahun 1636. Sampai blokade Belanda yang melumpuhkan itu dalam tahun-tahun 1650-an, Aceh tetap mengalirkan ladanya dari pantai barat dan timah dari Perak ke ibu kotanya, dan dengan demikian berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai pelabuhan utama di bagian timur dari Teluk Benggala.

Pemerintahan Ratu Aceh, Tajul Alam (1641-1675), merupakan masa damai dan makmur di tengah masa-masa yang sulit, tetapi yang juga menginstitusikan difusi kekuasaan yang terus berlangsung selama dua abad berikutnya. Pemimpin perang (Uleebalang Lokal), semakin besar pengaruhnya dan telah menggantikan posisi orang kaya. Tahun 1750, kekuasaan Uleebalang-uleebalang tertentu semakin kuat dan kegiatannya "mengangkat dan menurunkan Sultan" sudah menjadi kebiasaan.⁵⁰

Tetapi Aceh masih mampu bertahan sebagai kekuatan pedagang dan politik yang sangat berpengaruh. Pada tahun 1820, daerah ini menghasilkan lebih dari separuh pemasokan lada dunia. Namun setelah 1860-an diplomasi Aceh terhadap Inggris dan Amerika nampak melemah, maka dengan dilakukan ekspedisi Belanda pada tahun 1873, Belanda mulai memasuki peperangan yang sangat mengerikan di Aceh. Dan sejak itu kekuatan perdagangan dan politik di Aceh mulai merosot.

Penutup

Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Di Indonesia telah berkembang perdagangan dengan kapitalisme yang kuat. Tetapi perdagangan itu selalu terkait erat dengan permasalahan politik, sehingga yang terdapat sebenarnya kapitalisme birokrat. Situasi ini tidak akan memberikan landasan yang kuat untuk perkembangan kapitalisme yang memiliki etos perdagangan yang bebas.

Kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini VOC telah membawa dampak sangat serius terhadap kapitalisme Indonesia. Keunggulan VOC dalam bidang birokrasi, dan militer memberikan kekuatan kepadanya untuk menegakkan sistem monopoli dalam perdagangan di Indonesia, yang menghancurkan kapitalisme Indonesia.

Kehancuran kapitalisme Indonesia pada dasarnya lebih disebabkan sebagai akibat kerapuhan sistem budaya Indonesia yang tidak memberikan pijakan kuat terhadap perkembangan kapitalisme. Nilai-nilai budaya Indonesia tidak memiliki perlindungan yang kuat terhadap hak milik pribadi rakyat. Di samping itu, kekuasaan absolut para raja dengan tindakannya yang sewenang-wenang tidak memberikan peluang kondusif untuk perkembangan perdagangan dan akumulasi modal pada rakyat.

Berbeda dengan perkembangan di Eropa, pada kurun niaga Asia belum berkembang lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan dan industri. Kekurangan ini mengakibatkan para pedagang tidak dapat menginvestasikan uangnya dalam lembaga-lembaga keuangan dan industri. Hal ini membuat para pelaku ekonomi Indonesia tidak dapat memperluas usahanya ke bidang-bidang lain, dan situasi itu merupakan hambatan bagi perkembangan kapitalisme.

⁵⁰Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 310.

Daftar Pustaka

- Broundel, Ferdinand, *Civilization and Capitalism 15th-16th Century, the Wheels of Commerce*, vo. 2, Collins/Fontana Press, London, 1982.
- Chaudhuri, K.N., *Trade and Civilization in the Indian Ocean an Economic History from the Rise of Islam to 1750*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
- Corteseo, Armando (ed. and trans.), *the Suma Oriental of Tome Peres and the Book of Francisco Rodrigues*, 2 jilid, The Hakluyt Society, London, 1944.
- Hall, D.G.E., *Sejarah Asia Tenggara, Usaha Nasional*, Surabaya, 1988.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, Jilid 1, PT. Gramedia, Jakarta, 1988.
- Meilink-Roelofes, M.A.P., *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 about 1630*, The Hague Martinus Nijhoff, 1982.
- Onghokham, "Bentuk Negara di Indonesia dan Aspek Internasionalisasi" dalam Prisma No. 8, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Reid, Anthony, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, vol. 2, Yale University Press, New Haven and London, 1988.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.
- van Luer, G.C., *Indonesian Trade and Society*, The Hague van Hoeven, Bandung, 1955.
- Vlekke, Bernard H.M., *Nusantara a History of Indonesia*, Tha Hague, Leiden, 1965.